

BPK Selesaikan Audit 736 LHP

JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengaudit 736 laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan telah dimasukkan dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS) II tahun 2010. Kepala Biro Humas BPK Bahtiar Arif mengatakan, IHPS II/2010 akan diserahkan hari ini dalam sidang paripurna DPR.

“Besok (hari ini) akan diserahkan secara rinci, tapi yang jelas 736 LHP sudah diaudit,” ungkap Bahtiar di Jakarta kemarin.

Selain memeriksa 736 LHP, BPK juga mengaudit enam proyek besar yang berjalan pada 2010. Namun, Bahtiar enggan menyebutkan proyek-proyek yang diaudit laporan keuangannya oleh BPK.

Dia mengatakan, LHP yang diaudit merupakan laporan hasil keuangan kementerian/lembaga (K/L) maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk periode Juli–Desember 2010. Sementara untuk laporan keuangan tahunan, akan disam-

paikan pada pertengahan tahun ini.

Bahtiar memaparkan, laporan keuangan tahunan di setiap K/L maupun BUMN, sudah diserahkan ke BPK dan akan segera diaudit.

“Laporan keuangan K/L pada 2010 sudah diserahkan dan masuk pada Maret 2011. Sesuai UU, BPK akan mengaudit dalam waktu dua bulan. Mudah-mudahan bisa disampaikan akhir Mei atau paling lama awal Juli 2011,” papar Bahtiar.

Sekadar diketahui, pada hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah yang dilakukan BPK sepanjang semester I/2010, terungkap potensi kerugian negara sebesar Rp9,55 triliun.

BPK telah memeriksa sedikitnya 528 objek pemeriksaan yang terdiri atas 437 objek pemeriksaan keuangan, 7 objek pemeriksaan kinerja, dan 84 objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).

Dari 528 objek pemeriksa-

an tersebut, BPK menemukan 109.113 kasus senilai Rp26,12 triliun. Dari jumlah tersebut, ada potensi kerugian negara yang disebabkan ketidakpatuhan terhadap peraturan.

Potensi kerugian dan kekurangan penerimaan sebanyak 3.289 kasus dengan nilai Rp9,55 triliun. Dari potensi kerugian tersebut, Rp93,01 miliar telah ditindaklanjuti oleh *auditee* dengan penyetoran ke kas negara atau daerah selama proses pemeriksaan.

Dari pemeriksaan terhadap 78 laporan keuangan kementerian/lembaga, BPK menemukan 477 kasus kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 650 kasus ketidakpatuhan terhadap peraturan dengan nilai Rp4,98 triliun.

Selama proses pemeriksaan, temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan adanya indikasi kerugian dan potensi kerugian negara, sudah ditangani *auditee* dengan penyetoran kas senilai Rp40 miliar.

● wisnoe moerti